

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Poilisi (Diskresi Polisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2003, *Metode Research: (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suparni, Ninik, 2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun  
2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan  
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 138 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3781).

Peraturan Menteri Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang  
Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 397  
Tahun 2010).

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas  
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1714  
Tahun 2014).

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan  
Teknis Kometika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1986  
Tahun 2015).

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan  
Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita  
Negara Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2017).

### C. SKRIPSI

Pradinata, Rully, 2009, *Peredaran Obat Keras yang Ilegal dan Upaya Penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widianusita, Rudianti, 2011, *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melindungi Konsumen terhadap Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal*, Skripsi program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Situmeang, Yosua P., 2014, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu*, Skripsi program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

### D. INTERNET

Diakses di <http://www.pom.go.id/new/view/direct/solid>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB.

Diakses di <https://apjii.or.id/survei>, diunduh pada tanggal 14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB.

Edzhan Raharjo, "Dipasarkan Online, 6.059 Kemasan Kosmetik Ilegal di Yogya Disita Polisi", <http://news.detik.com/berita/2962467/dipasarkan-online-6059-kemasan-kosmetik-ilegal-di-yogya-disita-polisi>, diunduh tanggal 13 Februari 2017 Pukul 20.00 WIB.

Indriyani Astuti, <http://m.metrotvnews.com/news/news/8ko04ddK-bpom-akan-bentuk-satgas-siber-kejahatan-obat-dan-makanan>, diunduh tanggal 14 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB.

Mei Amelia R, "Polisi Bongkar Produsen Kosmetik Ilegal yang Dijual Online di Sunter", <http://news.detik.com/berita/3291600/polisi-bongkar-produsen-kosmetik-ilegal-yang-dijual-online-di-sunter>, diunduh tanggal 14 Februari 2017 Pukul 19.00 WIB.

Muhammad Khamdi, "Kosmetik Ilegal: Peredaran Secara Online Kian Marak", <http://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20140401/16/215953/Kosmetika-Ilegal-Peredaran-Secara-Online-Kian-Marak>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 19.00.